

Radar Semarang, 8 April 2022

# Pimpinan OPD Ikut Bangun Rumah

**BATANG, Radar Semarang** - Tahun ini, sebanyak 584 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Batang dapat alokasi rehabilitasi. Program tersebut berasal dari berbagai sumber pendanaan. Mulai dari kementerian, provinsi, dan kabupaten. Berasal dari APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari APBN, dan bantuan provinsi.

"Ada banyak alokasi untuk program RTLH. Namun, program bantuan BSPS tahun ini belum ada informasi. Bisa jadi tidak ada alokasi karena ada persoalan tahun kemarin," kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Batang Eko Widiyanto saat ditemui di kantornya.

Secara rinci, bantuan dari provinsi diberikan pada 279 penerima pada tahap pertama. Nominalnya mencapai Rp 12 juta untuk satu RTLH. Tahun ini pemberitaan program RTLH dari provinsi terbilang acak.

Sementara tahun sebelumnya tiap desa dijatah 3 RTLH. Eko menjelaskan hal tersebut terjadi karena masalah pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak tepat waktu.

Berikutnya, bantuan dari DAK dialokasikan untuk 25 penerima. Satu RTLH bakal menerima bantuan sebesar Rp 40 juta. Anggarannya berasal dari APBD dan dana pendamping atau desa. Sementara itu bantuan dari APBD dialokasikan untuk 280 penerima. Nominalnya

mencapai Rp 12,5 juta untuk satu RTLH. "Program RTLH ini terkendala alokasi anggaran yang tidak sama. Itu menimbulkan kecemburuan penerima program satu dengan lainnya. Harusnya ada kesinambungan jumlah antara pusat, provinsi dan pemda. Serta indikator yang jelas," terangnya.

Jumlah RTLH di Kabupaten Batang saat ini masih terbilang besar. Tercatat masih ada 41,1 ribu RTLH tersebar di seluruh kecamatan. (yan/ton)